

Edisi 15 | 2026

<https://bpkh.go.id/>

BPKH *NEWS*

**Balik Kerja Bareng
BPKH 2026**

Hal 08

**Menapaki
Cahaya dan Kedamaian
di Sheikh Zayed Grand Mosque**

Hal 26

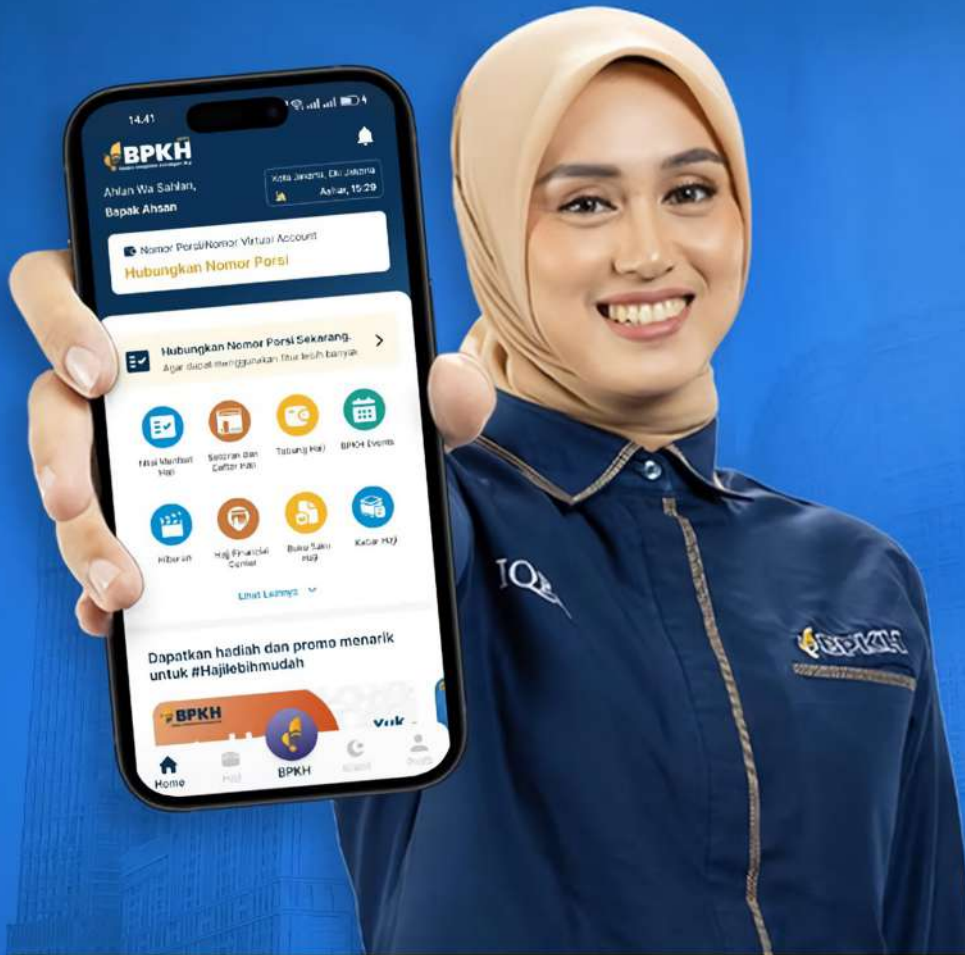
**BPKH Pastikan
Layanan dan Siapkan
152,4 Juta Riyal Saudi
untuk Living Cost Jemaah**

Hal 10

**RUU Dana Haji
DPR Siapkan
Arah Baru
Tata Kelola**

Hal 18

**KEMBALI FITRAH
MENYAMBUT LANGKAH
BARU**



Mau Tahu Estimasi Keberangkatanmu?

Cek estimasi keberangkatan dan nilai manfaat langsung di BPKH Apps.
Satu aplikasi untuk kelola rencana ibadah haji dengan mudah dan transparan.

BPKH Apps



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Edisi Maret-April ini hadir dalam suasana yang istimewa, mengiringi sukacita Idulfitri, sekaligus menyambut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.

Di tengah kepercayaan besar yang diamanahkan kepada BPKH dalam mengelola dana haji, berbagai capaian terus diraih sebagai wujud konsistensi dalam menjaga transparansi dan profesionalisme. Penghargaan sebagai Most Trusted Financial Brands 2026 menjadi penanda bahwa langkah yang ditempuh berada pada jalur yang tepat, menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi umat.

Edisi ini juga mengajak pembaca menelusuri upaya nyata di lapangan. Melalui peninjauan layanan konsumsi dan akomodasi jemaah di Madinah bersama Komisi VIII DPR RI. Di sisi lain, program Balik Kerja Gratis 2026 yang menjangkau ratusan peserta dari berbagai daerah menjadi cerminan kepedulian sosial yang sejalan dengan nilai-nilai kebersamaan pasca-Idulfitri.

Kami juga menghadirkan wawasan mendalam melalui wawancara eksklusif bersama Dr. H. M. Dawud Arif Khan, Anggota Dewan Pengawas BPKH. Sebagai penutup, dewan redaksi mengajak pembaca menapaki keindahan Sheikh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi. Kemegahan arsitektur yang berpadu dengan nilai-nilai kedamaian.

Akhir kata, semoga edisi ini tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menghadirkan inspirasi dan semangat baru dalam melayani umat. Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 H, mohon maaf lahir dan batin. Semoga langkah kita ke depan senantiasa diberkahi dalam menyongsong musim haji yang akan datang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam hangat, Tim Redaksi

PELINDUNG

Fadlul Imansyah,
Kepala Badan Pelaksana BPKH RI
Ahmad Zaky,
Sekretaris Badan BPKH RI

PENANGGUNG JAWAB

Demmy R Budiawan,
Kepala Divisi Komunikasi Strategis
BPKH RI

PEMIMPIN REDAKSI

Ricki Syahroni Putra,
Manajer Komunikasi Strategis BPKH RI

STAF REDAKSI

Yusuf Kadhafi

ALAMAT REDAKSI

Muamalat Tower Lantai 15
Jalan Prof. DR. Satrio No.Kav. 18,
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12940



BALIK KERJA BARENG BPKH 2026

08

BPKH PASTIKAN LAYANAN DAN SIAPKAN LIVING COST JEMAAH



10



ANTISIPASI RISIKO GLOBAL, BPKH JAGA STABILITAS DANA HAJI

12

KEMENKEU: BPKH INVESTOR STRATEGIS UTAMA SBSN 2025 04

BPKH DORONG INVESTASI SYARIAH LEBIH PRODUKTIF, FOKUS PERKUAT EKOSISTEM HAJI 05

BPKH SABET PENGHARGAAN 'MOST TRUSTED FINANCIAL BRANDS 2026', TEGASKAN KEAMANAN DANA HAJI 'ZERO LOSS' 06

BPKH CATAT 100% KEPATUHAN LHKPN, PERKUAT FONDASI KEPERCAYAAN PUBLIK 07

PERAN STRATEGIS PENGAWASAN DALAM KEBERLANJUTAN DANA

HAJI *Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si.,
Ak., CPA., QIA., QGIA.*



14



LENSA UMAT

16



BPKH HIDUPKAN EKONOMI KAMPUNG HAJI

20



RUU DANA HAJI

18



BPKH BAGIKAN RATUSAN PAKET SEMBAKO

22



MENAPAKI CAHAYA DAN KEDAMAIAN DI SHEIKH ZAYED GRAND MOSQUE

26



CITA RASA LEBARAN DARI BERBAGAI BELAHAN DUNIA

24



gambar 1 - foto bersama para pemenang haji banking award 2025

KEMENKEU: BPKH INVESTOR STRATEGIS UTAMA SBSN 2025

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali mengukuhkan posisinya sebagai pilar utama ekonomi syariah nasional. BPKH resmi menerima penghargaan bergengsi sebagai Investor Strategis Utama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun 2025 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dalam acara "Pembukaan Masa Penawaran Sukuk Ritel Seri SR024" yang berlangsung di Auditorium Gedung Frans Seda, Jakarta Pusat, Jumat (6/3).

Apresiasi ini diberikan atas kontribusi signifikan BPKH dalam memperkuat pasar perdana SBSN serta peran aktifnya dalam mendukung stabilitas

dan pengembangan instrumen keuangan syariah di Indonesia sepanjang tahun 2025.

Deputi Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas BPKH Erwinda menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan cerminan dari tata kelola investasi yang pruden dan strategis.

"Penghargaan ini adalah bukti komitmen BPKH dalam mengelola dana haji secara aman, efisien, dan optimal melalui instrumen syariah yang dijamin negara. Investasi pada SBSN tidak hanya memberikan nilai manfaat bagi jemaah haji, tetapi juga merupakan kontribusi riil kami dalam membiayai pembangunan ekonomi nasional melalui koridor syariah," ujar Erwinda.

Penyerahan penghargaan ini bertepatan dengan peluncuran Sukuk

Ritel seri SR024, sebuah instrumen investasi syariah yang ditujukan bagi masyarakat luas.

Kehadiran BPKH sebagai investor strategis diharapkan dapat terus memberikan kepercayaan (trust) bagi pasar modal syariah domestik.

Acara yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri oleh jajaran mitra strategis Kementerian Keuangan, Dealer Utama, serta mitra distribusi.

Ke depan, BPKH berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas dalam setiap kebijakan investasi. Hal ini dilakukan guna memastikan dana haji dikelola secara transparan dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi jemaah serta kemaslahatan umat.





BPKH DORONG INVESTASI SYARIAH LEBIH PRODUKTIF, FOKUS PERKUAT EKOSISTEM HAJI

Komitmen untuk memperkuat ekonomi syariah nasional kembali ditegaskan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam forum Sarasehan 99 Ekonom Syariah: Sharia Investment Forum 2026 di Jakarta. Forum ini menjadi ruang temu strategis antara regulator, akademisi, dan pelaku industri untuk merumuskan arah baru pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Indonesia.

Dalam forum tersebut, Wakil Presiden RI ke-13 sekaligus Ketua Dewan Penasihat CSED INDEF, Ma'ruf Amin, menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang inklusif. Ia mengingatkan bahwa kekayaan harus memberi manfaat luas bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan, sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Sejalan dengan itu, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, memaparkan bahwa dana kelolaan haji saat ini telah mencapai sekitar Rp180 triliun. Mayoritas dana ditempatkan

pada Surat Berharga Syariah Negara dengan porsi 75 persen dan imbal hasil sekitar 6,4 persen, sementara 20 persen lainnya berada di deposito perbankan syariah. Tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga imbal hasil tetap optimal di tengah dinamika nilai tukar rupiah terhadap riyal Saudi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, BPKH menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan regulasi. Revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji diharapkan dapat membuka ruang lebih luas bagi investasi langsung yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah.

Ke depan, arah investasi BPKH akan semakin terfokus pada sektor yang memberikan manfaat langsung bagi jamaah. Pendekatan ini menegaskan bahwa pengelolaan dana haji tidak hanya berorientasi pada imbal hasil, tetapi juga pada penguatan ekosistem haji dan umrah secara menyeluruh.

Selain itu, BPKH juga melihat potensi besar pada pengembangan pasar emas korporasi sebagai instrumen investasi produktif. Pengelolaan aset syariah diharapkan tidak berhenti pada akumulasi, tetapi mampu mendorong aktivitas ekonomi, menciptakan nilai tambah, dan memberikan dampak nyata bagi umat.

Melalui kolaborasi yang terbangun dalam forum ini, BPKH optimistis dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih aplikatif. Tujuannya jelas, memastikan pengelolaan dana haji yang aman, transparan, dan berkelanjutan sekaligus memperkuat peran ekonomi syariah sebagai pilar pertumbuhan nasional.



BPKH SABET PENGHARGAAN 'MOST TRUSTED FINANCIAL BRANDS 2026', TEGASKAN KEAMANAN DANA HAJI 'ZERO LOSS'

Komitmen Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam menjaga dana titipan umat mendapat apresiasi bergengsi. BPKH resmi dianugerahi gelar Most Trusted Financial Brands 2026, sebuah pengakuan atas transparansi lembaga dalam mengelola dana haji yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep R. Jayaprawira menegaskan bahwa pencapaian ini didukung oleh rekam jejak audit yang impresif. "Menuju tahun ke-9, BPKH telah meraih 7 kali opini WTP. Artinya, kami pastikan tidak ada uang jemaah yang hilang satu rupiah pun," ujar Acep dalam seremoni penghargaan di Jakarta (31/3).

Pencapaian ini memperkuat peta jalan

strategis BPKH tahun 2026 untuk terus meningkatkan standar tata kelola profesional demi menjaga amanah jutaan jemaah haji Indonesia.

"Prinsip kami jelas: dari jemaah, untuk jemaah," kata Acep R. Jayaprawira, Anggota Badan Pelaksana BPKH. Ia menambahkan bahwa penghargaan ini menjadi bukti dana jemaah haji dikelola dengan aman, profesional, dan likuid.

Dengan semangat *Boosting Public Trust*, BPKH berjanji akan terus memberikan manfaat berkelanjutan bagi seluruh jemaah haji Indonesia, memastikan setiap rupiah yang dititipkan terjaga dengan standar akuntabilitas tertinggi.

Ajang Most Trusted Financial Brands Awards sendiri dikenal sebagai barometer prestisius bagi institusi keuangan di Indonesia yang dinilai objektif dalam membangun reputasi positif.

Keberhasilan BPKH mempertahankan penghargaan ini sejak tahun 2025 menunjukkan adanya grafik kepercayaan yang terus meningkat, sekaligus memvalidasi bahwa strategi mitigasi risiko yang diterapkan lembaga telah berjalan di jalur yang tepat.

BPKH berkomitmen untuk terus mentransformasi strategi pengelolaan dana agar tidak hanya berhenti pada aspek keamanan, tetapi juga optimalisasi nilai manfaat.





BPKH CATAT 100 % KEPATUHAN LHKPN, PERKUAT FONDASI KEPERCAYAAN PUBLIK

Kepercayaan publik tidak dibangun dalam satu langkah besar, melainkan dari konsistensi pada hal-hal yang sering kali luput dari perhatian. Salah satunya adalah kepatuhan terhadap pelaporan harta kekayaan.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menunjukkan komitmen tersebut dengan mencatatkan capaian 100 persen kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum batas waktu yang ditetapkan. Capaian ini menjadi indikator penting bahwa tata kelola internal lembaga berjalan secara disiplin dan terstruktur.

Dalam pernyataannya, BPKH menegaskan bahwa kepatuhan ini bukan sekadar memenuhi kewajiban

administratif. Lebih dari itu, langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji yang dipercayakan oleh jutaan jemaah Indonesia.

Sebagai lembaga yang mengelola dana umat dalam skala besar, integritas menjadi aspek yang tidak dapat ditawar. Kepatuhan LHKPN menjadi salah satu fondasi penting dalam

memastikan setiap pengambilan keputusan tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik.

Capaian 100 persen ini sekaligus memperkuat positioning BPKH sebagai institusi yang tidak hanya fokus pada optimalisasi nilai manfaat, tetapi juga pada penguatan sistem pengawasan dan transparansi internal.

Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap keterbukaan lembaga keuangan, langkah ini menjadi sinyal bahwa BPKH terus bergerak ke arah yang tepat. Bukan hanya menjaga amanah, tetapi juga memastikan kepercayaan itu tetap tumbuh dan terpelihara.



BALIK KERJA BARENG BPKH 2026

**ANTUSIASME TINGGI
TEGASKAN DAMPAK NYATA
DANA UMAT**

Arus balik pasca-Lebaran selalu menghadirkan cerita yang sama setiap tahun. Lonjakan biaya, keterbatasan transportasi, dan kegelisahan para perantau untuk kembali bekerja tepat waktu. Di tengah situasi itu, kehadiran program Balik Kerja Bareng BPKH 2026 menjadi lebih dari sekadar fasilitas perjalanan. Ia menjelma menjadi solusi yang nyata dan dirasakan langsung manfaatnya.

Tahun ini, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberangkatkan total 2.700 peserta dari empat titik strategis, yakni Surabaya, Yogyakarta, Solo, dan Lampung. Sebanyak 60 bus eksekutif disiapkan untuk mengantarkan para peserta kembali ke berbagai kota tujuan di Pulau Jawa. Namun di balik angka tersebut, ada satu indikator yang jauh lebih penting. Antusiasme publik yang melonjak signifikan.

Lebih dari 11.000 orang mendaftar untuk program ini. Di





perlengkapan perjalanan, hingga pendampingan khusus bagi kelompok rentan. Lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, hingga anak-anak menjadi bagian dari desain layanan yang inklusif.

Kolaborasi lintas pihak turut memperkuat implementasi di lapangan. Pemerintah daerah, lembaga sosial, hingga aparat keamanan terlibat aktif memastikan proses keberangkatan berjalan tertib dan aman. Sinergi ini menjadi bukti bahwa program kemaslahatan akan lebih berdampak ketika dijalankan secara kolektif.

Bagi BPKH, Balik Kerja Bareng bukan sekadar program sosial. Ini adalah manifestasi dari mandat pengelolaan dana umat yang harus memberikan nilai tambah. Bahwa setiap rupiah yang dikelola tidak hanya aman, tetapi juga kembali dalam bentuk manfaat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi dan dampak sosial, langkah ini memperkuat posisi BPKH sebagai institusi yang tidak hanya kredibel secara finansial, tetapi juga signifikan secara sosial.

Pada akhirnya, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang diberangkatkan. Tetapi dari bagaimana kepercayaan itu bekerja. Tumbuh dari pengelolaan yang baik, lalu kembali dalam bentuk manfaat yang dirasakan langsung oleh umat.

Solo, jumlah pendaftar bahkan mencapai lebih dari sembilan kali lipat kuota. Yogyakarta mencatat tingkat pendaftaran hingga 400 persen dari kapasitas. Sementara di Surabaya dan Lampung, tingginya minat menunjukkan bahwa kebutuhan akan layanan arus balik yang aman dan terjangkau semakin nyata.

Fenomena ini memperlihatkan satu hal yang jelas. Program ini bukan sekadar inisiatif tahunan, tetapi telah menjadi kebutuhan publik.

BPKH merespons kebutuhan tersebut dengan pendekatan yang tidak hanya operasional, tetapi juga berbasis nilai. Seluruh pendanaan program bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat, bukan dari setoran awal jemaah haji. Artinya, pokok dana tetap terjaga, sementara hasil pengelolaannya dikembalikan untuk kemaslahatan.

Di sinilah letak diferensiasi BPKH. Pengelolaan dana tidak berhenti pada aspek keamanan dan akuntabilitas, tetapi diterjemahkan menjadi manfaat konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dari sisi pelaksanaan, program ini juga menunjukkan standar layanan yang semakin matang. Selain menyediakan transportasi gratis, BPKH memastikan peserta mendapatkan fasilitas pendukung seperti konsumsi,



BPKH PASTIKAN LAYANAN DAN SIAPKAN 152,4 JUTA RIYAL SAUDI UNTUK LIVING COST JEMAAH

Kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya ditentukan oleh aspek operasional, tetapi juga oleh ketepatan dalam memastikan kebutuhan dasar jemaah terpenuhi sejak awal keberangkatan. Pada titik inilah peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi krusial.

Untuk musim haji 1447 H/2026 M, BPKH menyiapkan banknotes dalam mata uang Riyal Arab Saudi sebesar SAR 152,49 juta. Dana tersebut dialokasikan sebagai biaya hidup atau living cost bagi 203.320 jemaah haji reguler Indonesia. Penyaluran dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), sebagai mitra perbankan yang ditunjuk untuk memastikan distribusi berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

Langkah ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bagian dari sistem pengelolaan keuangan haji yang dirancang terukur. Penyediaan uang tunai dalam bentuk banknotes menjadi elemen penting karena menyangkut kebutuhan langsung jemaah selama berada di Arab Saudi, mulai dari konsumsi tambahan hingga keperluan personal lainnya.

Dalam praktiknya, proses pengadaan dan distribusi banknotes dilakukan melalui mekanisme yang ketat. BPKH memastikan setiap tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan valuta asing, hingga distribusi ke jemaah, berjalan dalam koridor transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip syariah yang menjadi landasan utama pengelolaan dana haji.

Dari sisi nilai, total SAR 152,49 juta mencerminkan skala pengelolaan yang tidak kecil. Namun yang lebih penting



adalah bagaimana dana tersebut diterjemahkan menjadi kepastian bagi jemaah. Dengan skema living cost yang disiapkan sejak awal, jemaah memiliki ruang finansial yang cukup untuk menjalankan ibadah dengan lebih tenang, tanpa terbebani oleh kebutuhan dasar selama di tanah suci.

Kolaborasi dengan sektor perbankan turut memperkuat eksekusi di lapangan. Melalui BRI, distribusi banknotes dilakukan secara sistematis, terintegrasi dengan proses embarkasi, dan disesuaikan dengan jadwal



Annual BAST Living Cost Haji 7 H / 2026 M



keberangkatan jemaah di berbagai daerah. Model ini memungkinkan distribusi yang lebih efisien sekaligus meminimalkan potensi risiko.

Di sisi lain, langkah ini juga mencerminkan bagaimana BPKH terus memperkuat perannya tidak hanya sebagai pengelola dana, tetapi sebagai enabler dalam ekosistem perhajian. Pengelolaan dana tidak berhenti pada investasi dan pengembangan nilai manfaat, tetapi hadir secara konkret dalam mendukung kenyamanan jemaah.

Kesiapan living cost menjadi salah satu indikator

bahwa pengelolaan dana haji telah bergerak ke arah yang semakin matang. Tidak hanya aman secara administratif, tetapi juga relevan secara fungsional.

Pada akhirnya, keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari kelancaran ritual, tetapi dari bagaimana setiap aspek pendukungnya dipersiapkan dengan baik. Dalam konteks ini, penyediaan banknotes oleh BPKH menjadi bagian penting dari upaya memastikan bahwa jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang, terencana, dan bermartabat.

SAR Living Cost Haji Tahun 1447 H / 2026 M



ANTISIPASI RISIKO GLOBAL, BPKH JAGA STABILITAS DANA HAJI DI TENGAH TEKANAN NILAI TUKAR

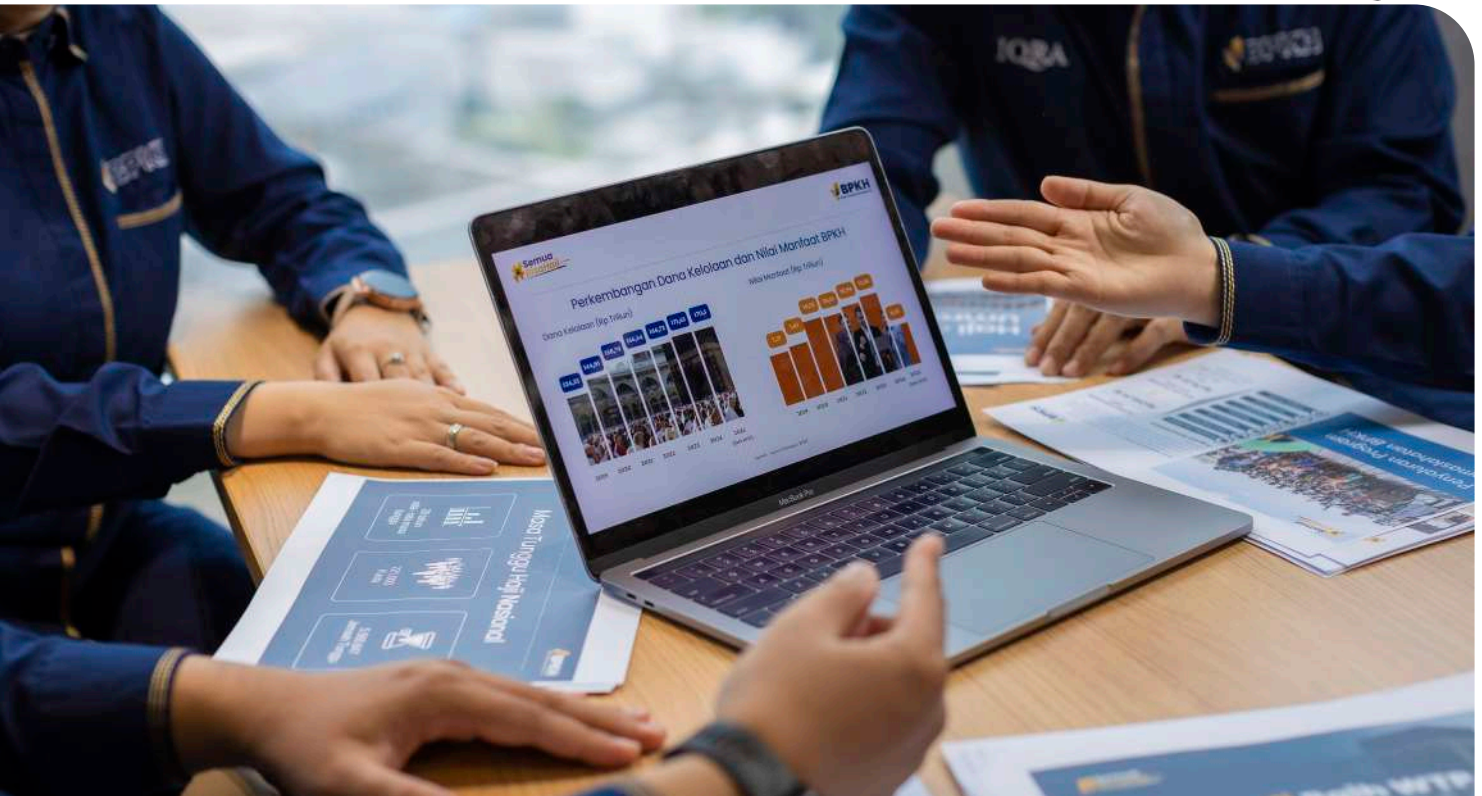
Dinamika geopolitik global kembali menjadi faktor yang tak bisa diabaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Fluktuasi nilai tukar dan potensi kenaikan biaya menjadi tantangan nyata yang harus diantisipasi sejak awal. Dalam konteks ini, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan bahwa stabilitas dana haji tetap terjaga dan berada dalam kondisi aman.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan bahwa struktur biaya haji Indonesia sangat dipengaruhi oleh mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat dan riyal Arab Saudi, yang porsinya mencapai sekitar 80 persen dari total biaya. Kondisi ini membuat volatilitas nilai tukar menjadi salah satu risiko utama dalam pembiayaan haji.

Untuk merespons situasi tersebut, BPKH telah mengambil langkah antisipatif dengan menyipkan cadangan devisa dalam bentuk dolar Amerika dan riyal Saudi sejak sebelum tekanan

geopolitik meningkat. Strategi ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas biaya sekaligus melindungi daya beli dana haji.





Di sisi kebijakan, BPKH menegaskan bahwa pengelolaan dana haji tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan. Hal ini menjadi penting mengingat panjangnya antrean jemaah haji Indonesia, sehingga setiap keputusan pembiayaan tidak hanya mempertimbangkan kondisi jangka pendek, tetapi juga dampaknya dalam jangka panjang.

BPKH juga membuka ruang penyesuaian porsi nilai manfaat untuk menjaga keterjangkauan biaya yang dibebankan kepada jemaah. Namun, langkah ini dilakukan secara hati-hati dan harus melalui mekanisme yang terukur serta kesepakatan antara pemerintah dan DPR, mengingat implikasinya terhadap akumulasi dana dan imbal hasil di masa mendatang.

Selain itu, penguatan strategi investasi terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pembiayaan dan keberlanjutan dana kelolaan. Diversifikasi portofolio, peningkatan kualitas aset, serta penguatan manajemen risiko dan likuiditas menjadi fokus utama. Upaya efisiensi biaya penyelenggaraan haji juga terus dioptimalkan untuk menekan potensi pembengkakan biaya.

Melalui kombinasi langkah tersebut, BPKH berupaya menjaga stabilitas dana haji sekaligus memastikan biaya yang dibebankan kepada jemaah tetap terkendali. Di tengah ketidakpastian

global, pendekatan ini menjadi kunci untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan dengan aman, terukur, dan berkelanjutan.

PERAN STRATEGIS PENGAWASAN DALAM KEBERLANJUTAN DANA HAJI

P Di balik pengelolaan dana haji yang aman dan berkelanjutan, terdapat proses panjang yang sering kali luput dari perhatian publik. Setiap keputusan investasi dan penempatan dana tidak lahir secara instan, melainkan melalui serangkaian tahapan ketat yang melibatkan berbagai perspektif mulai dari bisnis, manajemen risiko, hingga pengawasan.

Hal ini diungkapkan oleh Dr. H. M. Dawud Arif Khan, Anggota Dewan Pengawas BPKH, dalam sebuah wawancara eksklusif. Ia menggambarkan bahwa sistem pengawasan di BPKH memiliki karakter yang unik dan berlapis, dirancang untuk memastikan setiap keputusan benar-benar matang sebelum dijalankan.

Dalam praktiknya, salah satu tantangan terbesar bukan hanya pada kompleksitas proses, tetapi juga pada kebutuhan untuk bergerak cepat. Di satu sisi, peluang investasi menuntut respons yang sigap.

Setiap keputusan investasi di BPKH melewati proses berlapis yang menyeimbangkan kecepatan bisnis dengan prinsip kehati-hatian dan pengawasan ketat.

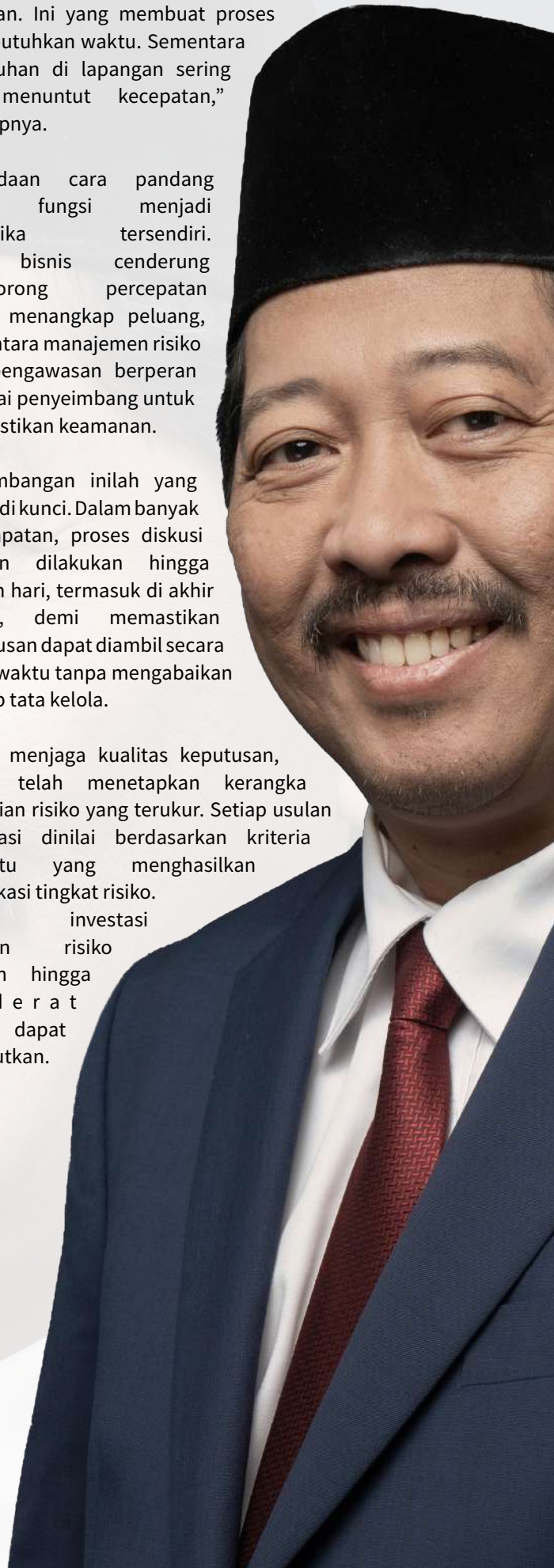
Namun di sisi lain, prinsip kehati-hatian tidak boleh dikompromikan.

“Setiap usulan harus melewati banyak tahapan. Ini yang membuat proses membutuhkan waktu. Sementara kebutuhan di lapangan sering kali menuntut kecepatan,” ungkapnya.

Perbedaan cara pandang antar fungsi menjadi dinamika tersendiri. Tim bisnis cenderung mendorong percepatan untuk menangkap peluang, sementara manajemen risiko dan pengawasan berperan sebagai penyeimbang untuk memastikan keamanan.

Keseimbangan inilah yang menjadi kunci. Dalam banyak kesempatan, proses diskusi bahkan dilakukan hingga malam hari, termasuk di akhir pekan, demi memastikan keputusan dapat diambil secara tepat waktu tanpa mengabaikan prinsip tata kelola.

Untuk menjaga kualitas keputusan, BPKH telah menetapkan kerangka penilaian risiko yang terukur. Setiap usulan investasi dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang menghasilkan klasifikasi tingkat risiko. Hanya investasi dengan risiko rendah hingga moderat yang dapat dilanjutkan.



Sementara itu, usulan dengan tingkat risiko lebih tinggi umumnya tidak diloloskan.

Pendekatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi alat kontrol yang efektif dalam menjaga disiplin pengelolaan dana. Perbedaan penilaian antara pihak pelaksana dan pengawas pun menjadi bagian dari proses evaluasi yang sehat.

“Kalau perbedaan penilaiannya terlalu jauh, berarti ada yang perlu ditelaah lebih dalam. Di situlah pengawasan bekerja,” jelasnya.

Seiring dengan berkembangnya portofolio BPKH, tantangan pengawasan pun ikut meningkat. Jika sebelumnya pengelolaan didominasi oleh instrumen yang relatif stabil seperti surat berharga dan penempatan di

Transformasi portofolio menuntut pengawasan adaptif, didukung digitalisasi, agar pengelolaan dana haji tetap transparan, terukur, dan berkelanjutan di tengah kompleksitas.

perbankan syariah, kini BPKH mulai merambah sektor baru.

Beberapa di antaranya termasuk pengembangan bisnis di Arab Saudi serta investasi pada sektor emas. Kedua sektor ini membawa karakter risiko yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan pengawasan yang juga lebih adaptif.

“Tidak semua risiko bisa diperlakukan sama. Misalnya, emas tidak bisa disamakan dengan surat berharga. Ini membutuhkan pemahaman baru,” ujarnya.

Transformasi ini menuntut peningkatan kapasitas, baik dari sisi sistem maupun sumber daya manusia, agar pengawasan tetap relevan dengan dinamika bisnis yang berkembang. Ke depan, penguatan pengawasan akan semakin diarahkan pada pemanfaatan teknologi. Digitalisasi dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas sekaligus transparansi.

Seiring dengan perkembangan bisnis yang semakin kompleks, sistem pengawasan juga perlu terus dikembangkan agar mampu mengikuti perubahan. Terlebih, adanya potensi perubahan regulasi di masa mendatang akan membawa dinamika baru dalam tata kelola keuangan haji.

Digitalisasi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga bagian dari transformasi menyeluruh dalam pengelolaan dan pengawasan dana haji.

Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CPA., QIA., QGIA.



**BERSAMA
MEMBERI,
BERSAMA
MEMBANGUN**



Dari langkah kecil hingga dampak besar, setiap kolaborasi menghadirkan perubahan



RUU DANA HAJI

**DPR SIAPKAN ARAH
BARU TATA KELOLA**

Perubahan besar dalam pengelolaan dana haji mulai memasuki tahap baru. Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengusulkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji sebagai inisiatif parlemen, menggantikan kerangka lama yang selama ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.

Keputusan ini disahkan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan. Setelah melalui proses harmonisasi di Badan Legislasi, rancangan beleid tersebut kini menjadi pijakan awal untuk merumuskan tata kelola dana haji yang dinilai lebih adaptif terhadap dinamika keuangan saat ini.

Sejumlah perubahan substantif menjadi sorotan. Salah satunya adalah penghapusan asas nirlaba dalam pengelolaan dana haji. Langkah ini dimaksudkan untuk membuka ruang pengelolaan yang lebih profesional, sehingga dana yang dihimpun tidak hanya aman, tetapi juga mampu menghasilkan nilai manfaat yang lebih optimal bagi jemaah.





Langkah ini menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas pengelolaan dan penguatan pengawasan. Di tengah besarnya dana yang dikelola dan tingginya ekspektasi publik, pembaruan regulasi menjadi kebutuhan yang tidak terhindarkan.

Kini, arah pembahasan RUU ini akan menjadi perhatian banyak pihak. Bukan hanya soal perubahan aturan, tetapi bagaimana regulasi baru ini nantinya mampu memastikan bahwa pengelolaan dana haji tetap aman, produktif, dan berpihak pada kepentingan jemaah dalam jangka panjang.

Meskipun demikian, prinsip kehati-hatian tetap dijaga. RUU ini menegaskan bahwa tidak ada pembagian dividen kepada pengelola, sehingga orientasi tetap berada pada kemaslahatan jemaah, bukan keuntungan institusional.

Perubahan lain yang cukup signifikan adalah penyesuaian mekanisme pengawasan dan pengambilan keputusan investasi. Dalam rancangan terbaru, kewajiban persetujuan dewan pengawas atas penempatan investasi diusulkan untuk dihapus, sekaligus menghilangkan tanggung jawab renteng jika terjadi kerugian. Di sisi lain, pengawasan eksternal diperkuat melalui pelibatan Otoritas Jasa Keuangan dalam memantau aktivitas investasi dana haji.

RUU ini juga membuka ruang yang lebih luas bagi Badan Pengelola Keuangan Haji untuk mengembangkan usaha, termasuk melalui pembentukan anak perusahaan di berbagai sektor. Kebijakan ini menandai pergeseran pendekatan, dari yang sebelumnya terbatas pada ekosistem haji, menjadi lebih fleksibel dalam mencari peluang nilai tambah.

Dari aspek akuntabilitas, mekanisme pelaporan turut diperjelas. Pengelolaan dana haji wajib dilaporkan kepada presiden dan DPR melalui menteri terkait, sementara pemerintah pusat juga diwajibkan menyampaikan evaluasi pelaksanaan undang-undang dalam kurun waktu dua tahun sejak diberlakukan.



BPKH HIDUPKAN EKONOMI KAMPUNG HAJI, DORONG KEMANDIRIAN USAHA DI DONGGALA

emaslahatan
peduli



w.bpk

Upaya menggerakkan ekonomi umat tidak selalu dimulai dari skala besar. Di Kampung Haji BPKH Donggala, Desa Lero, langkah itu justru dimulai dari hal yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu penguatan usaha kecil.

Melalui Program Semarak Kewirausahaan yang diluncurkan pada pertengahan Ramadan, Badan Pengelola Keuangan Haji menghadirkan pendekatan pemberdayaan yang menyentuh langsung kebutuhan pelaku usaha mikro. Program ini menjadi bagian dari inisiatif Berkah Ramadan yang tidak hanya berorientasi pada bantuan, tetapi pada penciptaan kemandirian.

Dukungan yang diberikan dirancang cukup komprehensif. Mulai dari pelatihan kewirausahaan untuk memperkuat kapasitas manajerial, hingga penyediaan sarana usaha seperti tenda bazar, meja, dan kursi. Selain itu, stimulus permodalan melalui Kelompok Usaha Bersama turut menjadi pengungkit agar aktivitas ekonomi warga dapat berjalan lebih stabil.

Di tengah suasana Ramadan, program ini juga dirangkai dengan kegiatan kebersamaan seperti buka puasa bersama dan pesantren kilat. Pendekatan ini memperlihatkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara penguatan ekonomi dan nilai spiritual yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Sulistyowati, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen dalam menyalurkan nilai manfaat dana umat secara tepat sasaran. Fokusnya bukan sekadar bantuan jangka pendek, tetapi mendorong masyarakat agar mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri.

Inisiatif serupa juga dijalankan di



sejumlah wilayah lain, seperti Sukabumi dan Sigi, sebagai bagian dari strategi pemerataan program kemaslahatan. Seluruh pendanaan berasal dari nilai manfaat Dana Abadi Umat yang dikelola secara hati-hati, dengan memastikan pokok dana tetap terjaga.

Bagi masyarakat, dampaknya mulai terasa. Bantuan yang diterima tidak hanya memperkuat usaha yang sudah berjalan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan

diri untuk berkembang. Bagi pelaku usaha kecil, akses terhadap pelatihan dan fasilitas sering kali menjadi pembeda antara bertahan dan tumbuh.

Melalui pendekatan ini, BPKH menempatkan diri tidak hanya sebagai pengelola dana, tetapi sebagai penggerak ekonomi di tingkat akar rumput. Dengan fondasi yang lebih kuat di level komunitas, perputaran ekonomi lokal diharapkan dapat tumbuh lebih stabil dan berkelanjutan.



BPKH PERLUAS DAMPAK SOSIAL

RAMADAN 2026 BPKH BAGIKAN RATUSAN PAKET SEMBAKO



Ramadan selalu menjadi momentum untuk memperkuat makna berbagi. Bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), momen ini juga menjadi ruang untuk memastikan bahwa nilai manfaat dana umat dapat dirasakan secara lebih luas dan nyata oleh masyarakat.

Melalui program “Menebar Manfaat Bersama BPKH 2026”, lebih dari 108 ribu paket sembako disalurkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Program ini bukan sekadar kegiatan distribusi bantuan, tetapi bagian dari strategi memperluas dampak sosial dari pengelolaan dana haji.



Dari total 110 ribu paket yang direncanakan, sebanyak 108.075 paket telah dialokasikan untuk masyarakat di berbagai provinsi. Distribusi menjangkau wilayah yang luas, mulai dari Sumatera Utara, Jawa, hingga Kalimantan dan Maluku. Sumatera Utara menjadi daerah dengan alokasi terbesar, diikuti Jawa Timur dan Jawa Barat, mencerminkan pendekatan distribusi yang mempertimbangkan kebutuhan dan jangkauan penerima manfaat.

Pelaksanaan program ini tidak dilakukan sendiri. BPKH menggandeng berbagai mitra kemaslahatan nasional seperti Baitulmaal Muamalat, NU Care-LAZISNU, Lazismu, Rumah Zakat, hingga Baznas. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk memastikan bantuan dapat tersalurkan secara efektif dan tepat sasaran, hingga ke tingkat komunitas.

Secara progres, distribusi terus berjalan. Hingga saat ini, lebih dari 76 ribu paket telah terealisasi, sementara sisanya berada dalam tahap penyaluran di berbagai daerah. Proses ini melibatkan jaringan lembaga sosial, pesantren, masjid, serta organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan penerima manfaat.

Bagi BPKH, program ini merepresentasikan pendekatan pengelolaan dana yang tidak berhenti pada aspek finansial. Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa dana haji harus mampu memberikan dampak sosial yang nyata, tidak hanya bagi jemaah, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Hal yang sama ditekankan oleh Anggota Badan Pelaksana Bidang Kemaslahatan, Sulistyowati, yang melihat kolaborasi sebagai

elemen penting dalam memastikan distribusi berjalan optimal. Dengan melibatkan berbagai mitra, program ini mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat secara merata.

Di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan sebagian masyarakat, bantuan kebutuhan pokok menjadi intervensi yang relevan dan berdampak langsung. Namun lebih dari itu, program ini juga memperkuat nilai kebersamaan yang menjadi esensi Ramadan.

Melalui inisiatif ini, BPKH menegaskan perannya tidak hanya sebagai pengelola dana haji, tetapi juga sebagai institusi yang menghadirkan manfaat sosial secara konkret. Dengan pendekatan yang terukur dan kolaboratif, nilai kemaslahatan yang dihasilkan diharapkan dapat terus tumbuh dan menjangkau lebih banyak masyarakat di masa mendatang.



CITA RASA LEBARAN DARI BERBAGAI BELAHAN DUNIA



Idul Fitri selalu identik dengan kebersamaan, silaturahmi, dan tentu saja hidangan istimewa yang tersaji di meja makan. Di Indonesia, ketupat, opor ayam, dan rendang menjadi menu yang tak tergantikan. Namun, di berbagai belahan dunia, umat Muslim merayakan hari kemenangan ini dengan ragam kuliner khas yang tak kalah menggugah selera.

Yordania

Di Yordania, *mansaf* merupakan hidangan nasional yang selalu hadir dalam berbagai perayaan besar, termasuk Idul Fitri. Hidangan ini terdiri dari nasi yang disajikan dengan potongan daging kambing yang dimasak dalam saus yogurt fermentasi khas yang disebut *jameed*.



Mansaf tidak hanya sekadar makanan, tetapi juga simbol identitas budaya dan kebersamaan. Biasanya disajikan dalam nampan besar, hidangan ini dinikmati bersama-sama oleh beberapa orang sekaligus.

Palestina



Di Palestina, hidangan seperti *maklooba* dan *musakhan* menjadi sajian khas saat Lebaran. *Maklooba*, yang secara harfiah berarti “terbalik”, adalah hidangan nasi berlapis yang terdiri dari daging biasanya kambing, sapi, atau ayam serta sayuran

seperti terong dan kembang kol. Semua bahan dimasak bersama dalam satu panci, lalu dibalik saat penyajian sehingga menghasilkan tampilan berlapis yang khas.

Hidangan ini kaya rasa berkat penggunaan rempah-rempah hangat seperti kayu manis, kunyit, dan allspice. *Maklooba* kerap disajikan dengan yogurt atau salad segar, dan biasanya hadir dalam acara keluarga atau perayaan besar sebagai simbol kebersamaan.

Sementara itu, *musakhan* merupakan ayam panggang berbumbu yang disajikan di atas roti datar dengan taburan bawang.

Suriyah: Ragam Hidangan Pembuka yang Menggugah Selera

Meja makan Lebaran di Suriyah biasanya dipenuhi berbagai hidangan pembuka (*mezze*) yang menggugah selera. Di antaranya adalah mutabal (saus terong panggang), *fattoush* (salad segar dengan potongan roti pita), serta *harrak isbaao*, hidangan berbahan lentil dan pasta dengan siraman molase delima.



Aljazair: Kehangatan dalam Sepiring Couscous



Di Aljazair, *couscous* menjadi sajian utama yang hampir selalu hadir saat Lebaran. Hidangan berbahan dasar *semolina* ini disajikan dengan sayuran, daging, serta kuah kaya rempah seperti jintan, ketumbar, kunyit, dan kayu manis.

Couscous biasanya disajikan dalam satu piring besar untuk dinikmati bersama. Tradisi makan bersama ini memperkuat rasa kebersamaan dan menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Aljazair. Selain *couscous*, hidangan seperti *tagine* dan *chakhchoukha* juga kerap melengkapi meja makan Lebaran.

Dari *maklooba* di Palestina hingga *couscous* di Aljazair, setiap hidangan membawa cerita tentang tradisi, sejarah, dan nilai-nilai kebersamaan. Inilah yang menjadikan Idul Fitri tidak hanya sebagai perayaan spiritual, tetapi juga perayaan budaya yang memperkaya khazanah umat Islam di seluruh dunia.

MENAPAKI CAHAYA DAN KEDAMAIAN DI SHEIKH ZAYED GRAND MOSQUE



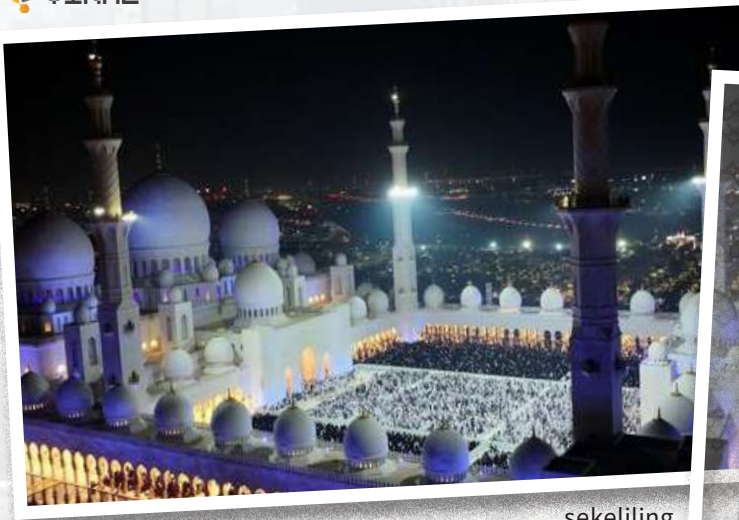


Di jantung Abu Dhabi, berdiri megah sebuah mahakarya arsitektur Islam, Sheikh Zayed Grand Mosque, yang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol kemegahan peradaban.

Masjid ini mengabadikan nama Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pendiri Uni Emirat Arab, yang memiliki visi menghadirkan sebuah masjid yang mencerminkan wajah Islam yang moderat, penuh kedamaian dan keterbukaan. Visi tersebut kini menjelma menjadi salah satu masjid yang mampu menampung sekitar 7.800 jamaah dalam satu waktu.

Keagungan Sheikh Zayed Grand Mosque terpancar dari 82 kubah yang menghiasi bangunannya. Kubah-kubah ini memadukan gaya arsitektur Islam khas Maroko dan Mughal, menciptakan komposisi visual yang anggun sekaligus monumental. Kubah terbesar yang berada di ruang salat utama memiliki diameter sekitar 32,6 meter dan menjulang hingga 84 meter. Balutan marmer putih, mahkota berbentuk bawang, serta ornamen bulan sabit berlapis mosaik emas menjadi detail yang memperkaya keindahan setiap sudutnya.

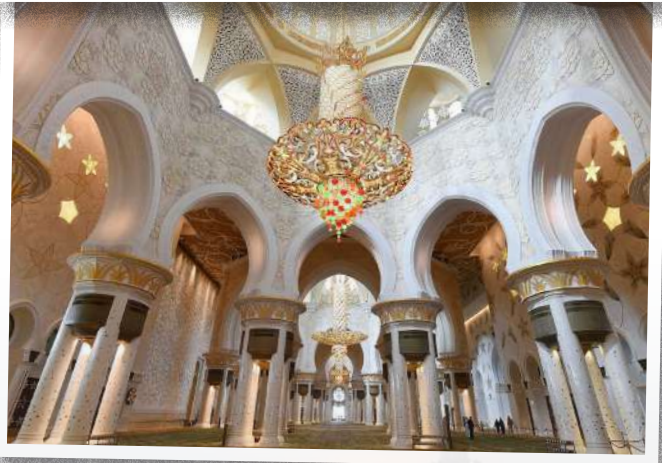
Keindahan masjid ini tidak hanya terletak pada bentuknya, tetapi juga pada material yang digunakan. Lebih dari 165.000 meter persegi marmer SIVIC dari Makedonia melapisi bagian luar bangunan, sementara marmer berkualitas tinggi dari Italia mempercantik interiornya. Di



sekeliling masjid, kolam-kolam reflektif berwarna biru membentang seluas hampir 7.000 meter persegi, menghadirkan kesejukan visual sekaligus mempertegas kesan megah yang menenangkan. Empat menara menjulang setinggi 107 meter di setiap sudut halaman.



Selain menjadi ruang ibadah, Sheikh Zayed Grand Mosque juga jadi pusat peradaban dan keilmuan. Di dalamnya terdapat Perpustakaan Al Jami', museum, serta berbagai pengalaman budaya yang membuka wawasan pengunjung tentang nilai-nilai Islam yang damai dan inklusif. Sepanjang tahun, ribuan tur budaya digelar, menjembatani dialog antarbangsa dan memperkenalkan kekayaan tradisi Islam kepada dunia.



Semangat berbagi dan kepedulian sosial juga terasa kuat, terutama saat Ramadan. Melalui inisiatif "Our Fasting Guests", jutaan hidangan iftar dan sahur dibagikan kepada para jamaah dan pengunjung. Dalam satu musim Ramadan dan Idulfitri saja, masjid ini menyambut hampir dua juta tamu.

Berbagai program edukasi dan pameran seni turut menghidupkan masjid ini sebagai pusat pembelajaran. Mulai dari pameran internasional hingga lokakarya budaya bagi pelajar, semuanya dirancang untuk menanamkan nilai toleransi, kreativitas, dan pemahaman lintas budaya sejak dini.



Segenap Pimpinan dan Insan BPKH
Turut Berbelasungkawa

Tragedi Kecelakaan Kereta Di Stasiun Bekasi Timur

Senin, 27 April 2026



Semoga para korban diberikan kekuatan dan ketabahan.
Do'a terbaik untuk para korban.

RENCANA PERJALANAN HAJI

Tahun 1447 H/2026 M

21 April 2026

4 Dzulq'adah 1447

Jemaah Haji masuk asrama haji

22 April – 6 Mei 2026

5 – 19 Dzulq'adah 1447

Pemberangkatan Jemaah Haji Gel. 1 dari Tanah Air ke Madinah

1 – 15 Mei 2026

14 – 28 Dzulq'adah 1447

Pemberangkatan Jemaah Haji Gel. 1 dari Tanah Air ke Madinah

7 – 21 Mei 2026

21 Dzulq'adah – 4 Dzulhijjah 1447

Pemberangkatan Jemaah Haji Gel. 2 dari Tanah Air ke Jeddah

16 Juni 2026

1 Muharram 1448

Tahun Baru Hijriyah 1448

26 Mei 2026

9 Dzulhijjah 1447

Wukuf di Arafah

21 Mei 2026

4 Dzulhijjah 1447

Closing Date (24.00 WAS)

27 Mei 2026

10 Dzulhijjah 1447

Idhul Adha 1447 H

1 Juni 2026

15 Dzulhijjah 1447

Awal kedatangan Jemaah Haji Gel. 1 di Tanah Air

1 – 15 Juni 2026

15 – 29 Dzulhijjah 1447

Pemulangan Jemaah Haji Gel. 1 ke Tanah Air

16 Juni – 1 Juli 2026

1 – 16 Muharram 1448

Kedatangan Jemaah Haji Gel. 2 di Tanah Air

7 – 30 Juni 2026

15 Dzulhijjah 1447

Pemulangan Jemaah Haji Gel. 2 ke Tanah Air

27 – 29 Mei 2026

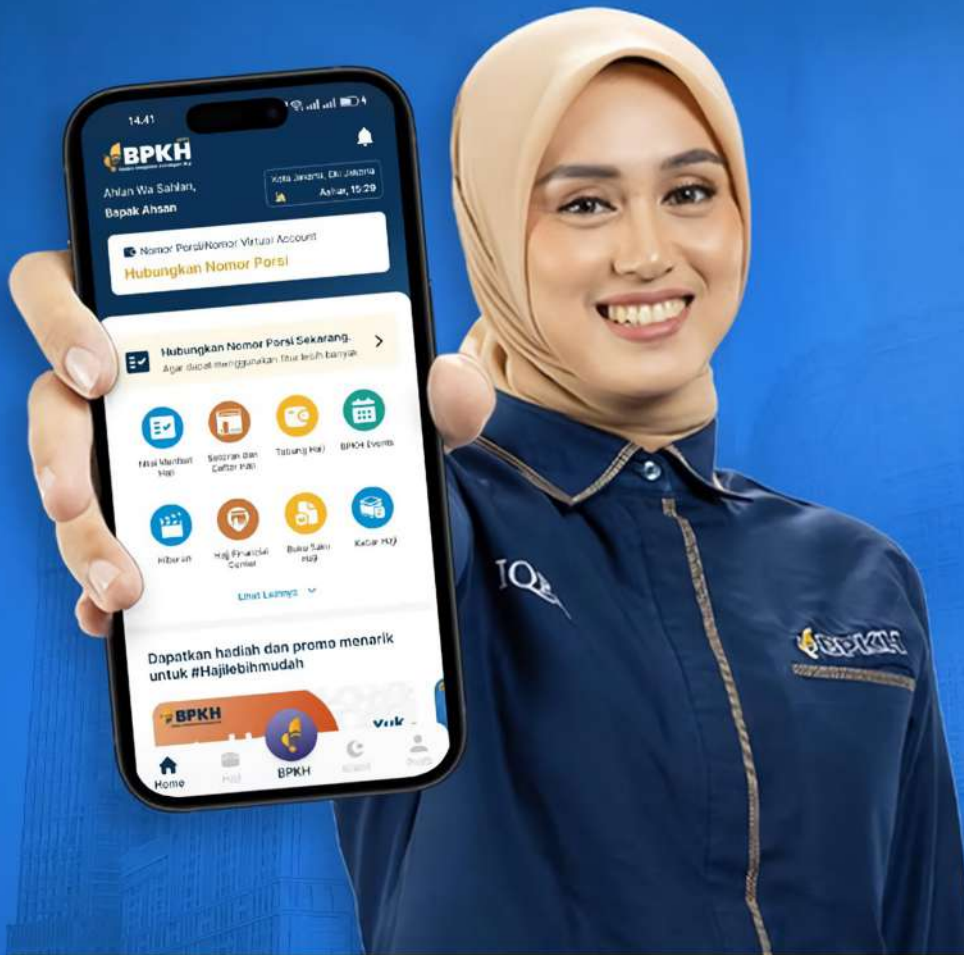
11 – 13 Dzulhijjah 1447

Hari Tasriq 1

Hari Tasriq 2 (Nafar awal)

Hari Tasriq 3 (Nafar Tsani)

source: haji.go.id/galeri/infografis



Mau Tahu Estimasi Keberangkatanmu?

Cek estimasi keberangkatan dan nilai manfaat langsung di BPKH Apps. Satu aplikasi untuk kelola rencana ibadah haji dengan mudah dan transparan.

BPKH Apps



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Muamalat Tower Lantai 15
Jalan Prof. DR. Satrio No.Kav. 18, Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940